

## **EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA DALAM PROGRAM BEDAH RUMAH DI DESA MATOLELE, KECAMATAN PARIGI TENGAH, KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Aisyah <sup>1,\*</sup>; Nurhannis <sup>2</sup>; Rusmawaty Bte Rusdin<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu, [aisyakinan8@gmail.com](mailto:aisyakinan8@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu, [nurhannis1964@gmail.com](mailto:nurhannis1964@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu, [rusmawatyrusdin2025@gmail.com](mailto:rusmawatyrusdin2025@gmail.com)

\*Correspondence : [aisyakinan8@gmail.com](mailto:aisyakinan8@gmail.com)

### ARTICLE INFO:

Kata kunci : Pencapaian tujuan, Integrasi, dan adaptasi

Received. : April 2026

Revised. : April 2026

Accepted : Mei 2026

### ABSTRAK

Program Bedah Rumah di Desa Matolele (Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong) menghadapi tantangan efektivitas dalam pencapaian sasaran dan akuntabilitas. Menggunakan metode kualitatif deskriptif (observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi) serta analisis model interaktif (Miles, 2014), penelitian ini melibatkan informan Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Tim Pelaksana, penerima manfaat, dan masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas (Richard, 2005) dengan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, hasil menunjukkan target fisik 3 unit rumah per tahun terpenuhi 2 selesai dan 1 proses. Kriteria penerima (desil 1/sangat miskin) telah tepat, namun masih ada 15 KRT miskin dengan RTLH belum terbantu karena bantuan justru dialokasikan ke usia produktif berkemampuan lebih baik. Kendala utama: keterlambatan pasokan kayu dan pasir akibat jarak dan cuaca. Rekomendasi: (1) kolaborasi antar desa untuk pengadaan material; (2) pelatihan manajemen logistik, standar konstruksi, dan pemeriksaan material bagi aparatur desa dan BPD; (3) sistem data digital RTLH terverifikasi untuk musyawarah desa yang objektif. Dengan demikian, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas Dana Desa dapat optimal, berdampak nyata pada kualitas hidup masyarakat miskin di Desa Matolele.

### ABSTRACK

*The House Renovation Program in Matolele Village (Parigi Tengah District, Parigi Moutong Regency) faces challenges in terms of effectiveness in achieving targets and accountability. Using descriptive qualitative methods (observation, in-depth interviews, documentation studies) and interactive model analysis (Miles, 2014), this study involved informants from the Village Head, the Head of the BPD, the Head of the Implementation Team, beneficiaries, and the community. Based on the theory of effectiveness (Richard, 2005) with indicators of goal achievement, integration, and adaptation, the results show that the physical target of 3 housing units per year has been met, with 2 completed and 1 in progress. The recipient criteria (decile 1/very poor) are appropriate, but there are still 15 poor household heads with RTLH who have not been assisted because assistance is allocated to productive age groups with better abilities. The main obstacle: delays in the supply of wood and sand due to distance and weather. Recommendations: (1) inter-village collaboration for material procurement; (2) training in logistics management, construction standards, and material inspection for village officials and the BPD; (3) a verified RTLH digital data*

*system for objective village deliberations. Thus, supervision, transparency, and accountability of Village Funds can be optimal, having a real impact on the quality of life of the poor in Matolele Village.*

## Pendahuluan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel, khususnya yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat (Lestari, 2023). Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi penentu dalam memastikan bahwa kebijakan dan implementasi program pemerintah desa, terutama yang menggunakan Dana Desa, berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, serta berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Riyadi, 2023). BPD memiliki peran strategis untuk mengawal setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, guna mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik (Susanto, 2024).

Dalam konteks penggunaan Dana Desa, pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap program-program prioritas seperti Program Bedah Rumah merupakan aspek yang sangat penting (Nawawi, 2024). Hal ini didasari pada pemahaman bahwa Dana Desa adalah instrumen vital untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di tingkat akar rumput, yang dialokasikan secara khusus untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kelembagaan desa (Asrifai, 2022). Sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa harus mengutamakan kepentingan masyarakat miskin dan kelompok rentan. Tanpa pengawasan yang ketat dari BPD (Nurhannis, 2022), potensi terjadinya penyimpangan seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat atau kebocoran anggaran dapat terjadi, yang pada akhirnya akan menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di desa (Kaawoan 2024.)

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Matolele, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat aktif dan strategis dalam program bedah rumah, yang diwujudkan melalui keterlibatan menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pengawasan (Waris, 2021). Pelaksanaan fungsi pengawasan ini diwujudkan melalui mekanisme seperti keterlibatan dalam musyawarah penetapan penerima manfaat, penetapan anggaran sebesar Rp20 juta per unit rumah, serta pengawasan harian pelaksanaan fisik pembangunan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, pelaksanaan fungsi ini menghadapi tantangan kompleks, baik dari kendala logistik material seperti keterlambatan pasokan kayu dan pasir, maupun dari potensi subjektivitas dalam proses seleksi jika tidak ada mekanisme *checks and balances* yang kuat antara BPD dan Kepala Desa (Wibowo, 2019).

Fungsi pengawasan BPD diukur melalui pendekatan tiga dimensi yang saling melengkapi preventif (pencegahan penyimpangan melalui musyawarah desa dan verifikasi data calon penerima), represif (tindakan konkret seperti pengawasan harian dan koordinasi dengan tim pelaksana untuk menyelidiki indikasi masalah), dan

evaluatif (penilaian akhir terhadap pencapaian target fisik rumah yang selesai direnovasi serta dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat) (Alamsyah, 2024). Dengan menerapkan ketiga dimensi ini, BPD dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pengawasannya, sehingga dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran untuk memastikan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan *ultimately* mendorong percepatan pembangunan di Desa Matolele (Susanto, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa dalam Program Bedah Rumah di Desa Matolele. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, khususnya kendala logistik material dan kapasitas sumber daya manusia, yang diduga menyebabkan pelaksanaan program ini belum berjalan secara optimal (Zaitun, 2022). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Matolele, BPD, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif, guna memastikan Dana Desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan dialokasikan secara optimal untuk mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Matolele, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong.

## Metode

Dasar penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Rusandi 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami kondisi alamiah objek penelitian secara mendalam, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data (Abdussamad, 2021). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang diartikan sebagai metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang ada dalam masyarakat tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti, melainkan mengandalkan data berupa kata-kata, gambar, atau deskripsi naratif (Waruwu, 2024). Desain deskriptif ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa dalam Program Bedah Rumah di Desa Matolele, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Teori yang digunakan untuk menganalisis efektivitas program ini adalah konsep dari (Richard 2005) yang merujuk pada model Duncan, dengan tiga indikator utama, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi, yang dinilai mampu memberikan gambaran komprehensif tentang keberhasilan program.

Teknik pengumpulan data meliputi tiga cara. Pertama, observasi, yaitu suatu cara kompleks yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data akurat melalui pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Kedua, wawancara mendalam, yaitu cara mendapatkan data akurat dengan turun langsung ke lapangan, menggunakan teknik untuk menentukan informan yang dianggap mengetahui

masalah yang diteliti (Assyakurrohim, 2022). Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bedah Rumah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penerima manfaat program, dan masyarakat Desa Matolele. Ketiga, studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data akurat berupa bukti tertulis seperti catatan, notulen rapat, transaksi buku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, dibantu dengan instrumen pendukung seperti alat tulis, dokumentasi, daftar pertanyaan wawancara (pedoman wawancara), dan lembar observasi. Model analisis data yang diterapkan mengikuti metode interaktif yang dicetuskan oleh (Miles, 2014), yang memiliki tiga komponen utama. Pertama, kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan pengabstraksian data dari catatan lapangan dan transkrip wawancara. Kedua, penyajian data (*data display*), di mana peneliti menyusun informasi ke dalam format narasi atau teks deskriptif untuk memudahkan pemahaman. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*), yaitu peneliti mengembangkan kesimpulan sejak awal pengumpulan data dan memverifikasinya hingga tahap akhir, di mana semua data yang dikumpulkan dikompilasi untuk menjawab rumusan masalah.

## Hasil

Dalam konteks efektivitas penggunaan Dana Desa pada program bedah rumah, pencapaian tujuan menjadi indikator fundamental untuk menilai sejauh mana program ini berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori efektivitas dari (Richard, 2005) yang digunakan dalam skripsi ini, pencapaian tujuan mengukur keberhasilan organisasi dalam mewujudkan sasaran yang telah direncanakan. Di Desa Matolele, program bedah rumah menunjukkan progres yang cukup baik, di mana target rutin tahunan sebanyak 3 unit rumah hampir terpenuhi sepenuhnya. Hingga saat ini, dua rumah telah dinyatakan selesai, sedangkan satu unit sisanya masih dalam tahap penyelesaian, tepatnya pada pengerjaan lantai. Program ini secara konsisten menyoal masyarakat kurang mampu yang termasuk dalam kategori desil 1 sebagai kriteria penerima manfaat, sehingga tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Aspek koordinasi dengan masyarakat dalam program ini berjalan lancar karena dikelola melalui prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat bersama.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas program secara keseluruhan juga sangat ditentukan oleh indikator proses, yaitu akuntabilitas penggunaan anggaran, transparansi dalam seleksi penerima manfaat, serta peran pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Kepala Desa Matolele menyatakan bahwa program bedah rumah dilaksanakan secara rutin per tahun dengan target 3 unit rumah, di mana kriteria penerima adalah masyarakat kurang mampu yang masuk dalam desil 1. Progres pelaksanaan program berjalan

dengan 2 rumah telah selesai dan 1 rumah dalam proses pengerjaan (tinggal lantai). Koordinasi dengan masyarakat dinilai lancar karena didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan bersama, meskipun kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan suplai bahan baku, terutama kayu, yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian. Dengan demikian, keberhasilan dan keberlanjutan program bedah rumah tidak hanya dilihat dari aspek fisik bangunan yang terbangun, tetapi dari terpenuhinya seluruh indikator pencapaian tujuan yang membuktikan bahwa penggunaan Dana Desa telah tepat guna, tepat sasaran, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dari perspektif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peran lembaga ini dalam program bedah rumah sangat aktif, mulai dari penetapan anggaran, keterlibatan dalam musyawarah penetapan penerima, hingga pengawasan harian pelaksanaan fisik. Pengawasan ketat dilakukan karena program ini menggunakan anggaran Dana Desa. Kriteria penerima ditegaskan kembali sebagai warga yang benar-benar tidak mampu dengan rumah tidak layak huni. Anggaran per unit rumah adalah Rp20 juta, sehingga total Rp60 juta per tahun. Keputusan akhir penetapan penerima harus melalui persetujuan BPD dan Kepala Desa berdasarkan prioritas, yang mencerminkan adanya mekanisme checks and balances dalam tata kelola program. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik di mana pengelolaan keuangan program harus diawasi secara ketat untuk menghindari penyimpangan, sementara pelaporan hasil program kepada masyarakat perlu ditingkatkan secara berkelanjutan (Nurhannis, 2022)

Berdasarkan penjelasan tim pelaksana bedah rumah, prosedur teknis program dimulai dari survei kondisi rumah dan ekonomi calon penerima. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh aparat desa secara gotong royong tanpa digaji. Tantangan utama yang sering dihadapi adalah masalah kualitas dan ketepatan waktu pengiriman bahan material, khususnya kayu dan pasir, yang terkadang harus didatangkan dari jauh dan terganggu cuaca. Namun, untuk material lain seperti batako, kualitasnya terjamin. Pendampingan dan pengawasan selama pelaksanaan dilakukan oleh aparat desa dan pendamping desa. Program ini menghadapi tantangan signifikan dalam hal logistik material, di mana sering kali terjadi keterlambatan pengiriman karena bahan-bahan tersebut harus didatangkan dari lokasi yang jauh, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi faktor penghambat utama.

Dari sisi penerima manfaat, terungkap ekspresi syukur yang mendalam atas bantuan yang diterima. Para penerima manfaat mengakui bahwa mereka tidak berjalan sendirian; proses pembangunan rumah melibatkan peran aktif dari keluarga dan tetangga di sekitarnya. Keterlibatan sukarela ini merupakan cerminan nyata dari semangat gotong royong dan ikatan sosial yang masih kuat dalam komunitas mereka. Keterlibatan masyarakat sekitar dalam membantu pekerjaan pembangunan merupakan bentuk konkret dari partisipasi sosial yang berhasil memobilisasi dan memberdayakan warga, mengubah mereka dari sekadar penerima pasif menjadi mitra aktif dalam proses perbaikan kehidupan mereka sendiri. Program ini dinilai

sangat membantu dan telah membawa perubahan yang signifikan bagi kondisi tempat tinggal mereka, melampaui aspek fisik bangunan saja, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, memulihkan harapan, dan meningkatkan kualitas hidup secara nyata.

### 1. Integritas

Dalam kerangka teori efektivitas (Richard, 2005), integrasi berfokus pada kelancaran proses dan kolaborasi antar berbagai pihak yang terlibat. Efektivitas penggunaan Dana Desa tidak hanya dilihat dari produk akhir berupa rumah yang terbangun, tetapi juga dari bagaimana pemerintahan desa, tim pelaksana, masyarakat penerima manfaat, hingga penyedia material dan tenaga kerja lokal dapat bekerja sama dengan harmonis. Di Desa Matolele, integrasi diejawantahkan melalui kemampuan aparatur desa dalam mengoordinasikan tahapan program mulai dari identifikasi penerima, penetapan spesifikasi teknis bedah rumah, penjadwalan pelaksanaan, hingga verifikasi hasil dengan melibatkan BPD, tim verifikasi independen, dan pihak terkait dari kabupaten.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program bedah rumah di Desa Matolele bukanlah inisiatif sepihak atau keputusan pribadi kepala desa, melainkan buah dari musyawarah yang melibatkan masyarakat secara luas. Proses pengambilan keputusan yang partisipatif ini didukung oleh keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga memastikan bahwa program benar-benar menyuarakan kebutuhan dan aspirasi warga. Melalui pendekatan ini, tercipta integrasi horizontal yang kuat antar warga dan integrasi vertikal yang baik antara masyarakat dengan perangkat desa, membangun landasan kerja kolektif yang kokoh. Berdasarkan kesepakatan musyawarah, program menargetkan pembangunan atau perbaikan sebanyak 21 unit rumah dengan strategi realisasi bertahap rata-rata 3 unit per tahun.

BPD memegang peran yang sangat sentral dan strategis dalam sistem tata kelola program, khususnya dalam fungsi pengawasan dan penganggaran yang terintegrasi. Peran kunci ini mencakup keseluruhan proses, mulai dari tahap penetapan penerima manfaat, penentuan besaran alokasi anggaran, hingga pemantauan harian pelaksanaan fisik di lapangan. Dinamika hubungan antara BPD dan Kepala Desa dirancang dalam kerangka saling mengontrol dan berbagi tanggung jawab untuk menciptakan *checks and balances* di tingkat pemerintahan desa. Setiap usulan atau kebijakan program harus melalui proses persetujuan bersama dari kedua pihak, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki kewenangan absolut. Mekanisme kolaboratif ini berfungsi sebagai jaminan bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Integrasi teknis operasional program berjalan melalui rangkaian yang komprehensif, mulai dari tahap survei awal hingga monitoring akhir. Namun, di balik kekuatan teknis tersebut, program ini menghadapi tantangan nyata pada aspek integrasi logistik. Keterlambatan dalam pasokan bahan baku kerap terjadi, terutama akibat faktor geografis seperti jarak yang jauh dan kondisi cuaca yang tidak menentu.

Meskipun menghadapi kendala logistik, kekuatan utama program justru terletak pada integrasi pelaksanaan fisik yang sangat solid, yang bersumber dari partisipasi aktif masyarakat desa dengan mengandalkan semangat gotong royong. Program ini menjadi contoh nyata keberhasilan integrasi sumber daya manusia di tingkat desa, di mana keterlibatan menyeluruh masyarakat menciptakan ekosistem kolaborasi yang kokoh.

Dari perspektif penerima manfaat, proses integrasi sosial berjalan dengan baik melalui keterlibatan aktif tetangga, menciptakan harmoni antara bantuan pemerintah dan gotong royong masyarakat. Para penerima menilai seleksi sudah tepat sasaran dan mereka merasa ditempatkan sebagai subjek partisipatif bukan sekadar objek, berkat keterlibatan sejak musyawarah hingga pembangunan. Kendala yang dirasakan tetap pada keterlambatan material, yang menghambat penyelesaian program. Namun demikian, semangat gotong royong dan koordinasi tetap terjaga meski di tengah hambatan teknis yang dihadapi, menunjukkan bahwa integrasi sosial yang kuat dapat menjadi perekat ketika menghadapi tantangan operasional.

## 2. Adaptasi

Dalam konteks skripsi yang mengangkat efektivitas penggunaan Dana Desa untuk program bedah rumah, adaptasi menekankan pada keluwesan program dalam menghadapi tantangan dan perubahan di lapangan. Program Bedah Rumah di Desa Matolele mungkin menemui kendala di luar rencana, seperti kenaikan harga material, kondisi rumah yang lebih rusak dari perkiraan, atau munculnya warga yang membutuhkan bantuan mendadak. Peran pemerintah desa sebagai regulator menjadi indikator kunci adaptasi yang menentukan keberhasilan program. Sebagai regulator, Pemerintah Desa Matolele memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan kerangka aturan operasional yang spesifik dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program bedah rumah pada dasarnya dilaksanakan dengan berpedoman pada perencanaan fisik yang telah disusun sebelumnya. Namun, esensi dari program ini bukanlah sekadar pelaksanaan teknis yang kaku dan tertutup. Program ini dirancang dengan prinsip fleksibilitas dan responsif, mengakui bahwa kebutuhan riil penerima manfaat mungkin tidak sepenuhnya tertampung dalam desain awal. Oleh karena itu, adaptasi terhadap rencana fisik bukan dilihat sebagai penyimpangan, melainkan sebagai sebuah keniscayaan dalam pendekatan pembangunan yang partisipatif dan berpusat pada masyarakat. Proses adaptasi dilakukan melalui mekanisme formal musyawarah, yang menjadi ruang dialog untuk menampung aspirasi dan kondisi nyata dari calon penerima manfaat.

Adaptasi dalam program juga terlihat dari fleksibilitas anggaran dan proses penetapan prioritas. BPD terlibat penuh dalam musyawarah desa untuk menetapkan penerima dan menentukan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Meskipun standar bantuan adalah Rp20 juta per unit, proses musyawarah memungkinkan adanya penyesuaian prioritas. Jika ada usulan dari

masyarakat namun dinilai kurang prioritas oleh BPD atau Kepala Desa, dapat terjadi pembahasan ulang. Dengan demikian, adaptasi terjadi melalui mekanisme konsultasi dan musyawarah yang menjamin anggaran digunakan untuk yang paling membutuhkan, sesuai kondisi nyata di lapangan. Mekanisme ini menjamin bahwa setiap aspirasi dapat dipertimbangkan kembali, sehingga alokasi sumber daya tidak serta-merta ditolak, melainkan dievaluasi melalui konsensus.

Tim pelaksana juga harus beradaptasi dengan kendala teknis di lapangan, terutama terkait ketersediaan dan kualitas bahan material. Tantangan utama sering kali pada pasokan kayu dan pasir yang terlambat atau kualitasnya tidak sesuai. Untuk mengatasi hal ini, tim beradaptasi dengan menyesuaikan jadwal pengerjaan dan mencari sumber bahan baku alternatif yang lebih jauh namun berkualitas. Adaptasi juga dilakukan dalam metode kerja, di mana pelaksanaan dikerjakan oleh aparat desa secara gotong royong tanpa digaji, sebagai bentuk penyesuaian terhadap besaran anggaran yang tersedia. Meskipun prosesnya lebih lambat, adaptasi ini memastikan bahwa rumah tetap dibangun dengan kualitas yang baik.

Sebagai penerima manfaat, masyarakat juga beradaptasi dan terlibat aktif selama proses pembangunan. Keterlibatan ini adalah bentuk adaptasi program terhadap sumber daya lokal. Masyarakat, bersama tetangga dan keluarga, turut membantu pekerjaan fisik seperti pendirian fondasi. Ini menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan bantuan pasif, tetapi mampu beradaptasi dengan budaya gotong royong masyarakat setempat. Pelaksana (aparat desa) juga mendampingi dan mengawasi secara langsung, sehingga terjadi interaksi dan penyesuaian selama proses pengerjaan sesuai kondisi rumah dan kemampuan warga. Dengan mengintegrasikan tenaga dan aspirasi warga ke dalam proses pembangunan, program berubah dari sekadar penyaluran bantuan material menjadi suatu kolaborasi kolektif yang membangun rasa kepemilikan bersama, meningkatkan akuntabilitas sosial, dan memastikan hasil akhir lebih sesuai dengan konteks serta kebutuhan spesifik penerima manfaat.

## **Pembahasan**

### **1. Pencapaian Tujuan: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dan Koordinasi Dalam Program Bedah Rumah**

Pencapaian tujuan merupakan indikator pertama dalam mengukur efektivitas penggunaan Dana Desa pada Program Bedah Rumah di Desa Matolele. Indikator ini tidak hanya melihat apakah rumah-rumah berhasil dibangun, tetapi juga menilai sejauh mana program tersebut mampu memenuhi target kuantitatif, meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, serta memastikan ketepatan sasaran bantuan. Dalam konteks ini, pencapaian tujuan menjadi fondasi utama untuk menentukan apakah intervensi pemerintah desa melalui Dana Desa telah berhasil memecahkan masalah ketidaklayakan hunian yang dihadapi oleh warga miskin.

Berdasarkan temuan lapangan, program ini menunjukkan progres yang cukup baik dalam memenuhi target fisik tahunan. Pemerintah Desa Matolele menargetkan

rehabilitasi sebanyak 3 unit rumah per tahun, dan hingga saat ini dua rumah telah selesai 100% sementara satu unit sisanya masih dalam proses pengerjaan lantai. Kepala Desa Tefan menyatakan bahwa target tersebut merupakan hasil musyawarah bersama masyarakat dan telah disepakati secara kolektif. Keberhasilan mencapai sebagian besar target fisik ini menjadi indikator awal bahwa alokasi Dana Desa sebesar Rp60 juta per tahun (Rp20 juta per unit) telah terserap dengan baik untuk kegiatan pembangunan. Namun, capaian ini belum sempurna karena masih terdapat satu rumah yang belum rampung, yang mengindikasikan adanya kendala dalam efisiensi waktu pelaksanaan.

Dari sisi kualitas hasil dan ketepatan sasaran, program ini dinilai telah berjalan dengan baik. Tim Pelaksana yang diwawancarai menyatakan bahwa meskipun menghadapi kendala material, kualitas bangunan tetap dijaga melalui pengawasan ketat dari aparat desa dan pendamping desa. Lebih penting lagi, kriteria penerima manfaat ditegaskan secara konsisten oleh BPD dan pemerintah desa, yaitu warga desil 1 (masyarakat sangat miskin) yang memiliki rumah tidak layak huni. Ketua BPD, Aksam, menegaskan bahwa setiap usulan penerima harus melalui verifikasi ketat dan disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa. Penerima manfaat seperti Ibu Sumiati dan Ibu Samsidri juga mengkonfirmasi bahwa mereka merasa program ini tepat sasaran dan sangat membantu perubahan signifikan pada kondisi tempat tinggal mereka.

Ditinjau dari teori efektivitas (Richard, 2005), pencapaian tujuan program bedah rumah di Desa Matolele dapat dikatakan berhasil secara substantif namun belum optimal secara temporal. Steers menekankan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana organisasi mencapai seluruh sasarannya, dan dalam hal ini target 3 unit rumah per tahun hampir tercapai. Namun, ketidaktercapaian penyelesaian 1 unit rumah tepat waktu menunjukkan adanya celah dalam dimensi efisiensi proses. Steers juga mengingatkan bahwa efektivitas bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga bagaimana tujuan itu dicapai tanpa melumpuhkan sumber daya. Dalam kasus ini, sumber daya manusia (gotong royong) justru diperkuat, namun rantai pasok material menjadi titik lemah yang menyebabkan satu rumah belum selesai.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu oleh (Alamsyah, 2024) tentang Meningkatkan Pembangunan Di Desa Olonggata, yang juga menemukan bahwa program berjalan efektif namun terkendala oleh ketepatan waktu dan akurasi data penerima. Demikian pula, penelitian (Irwan, 2021) tentang pelaksanaan pembangunan bedah rumah bagi masyarakat yang kurang mampu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi mengidentifikasi bahwa akurasi sasaran dan kualitas material menjadi faktor kunci efektivitas. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengungkapan bahwa di Desa Matolele, kendala waktu disebabkan secara spesifik oleh keterlambatan suplai kayu dan pasir dari luar desa, sebuah temuan yang belum banyak diangkat dalam studi sebelumnya tentang Dana Desa di wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada indikator pencapaian

tujuan, program bedah rumah di Desa Matolele telah berhasil secara substantif (tepat sasaran dan berkualitas), namun masih menghadapi tantangan pada aspek ketepatan waktu. Capaian 2 dari 3 unit rumah selesai, ditambah dengan satu rumah dalam proses akhir, menunjukkan bahwa program ini berada pada jalur yang benar menuju penyelesaian. Ke depan, penguatan manajemen rantai pasok material menjadi syarat mutlak agar target tahunan dapat dicapai 100% tepat waktu. Keberhasilan dalam menjaga kualitas bangunan dan ketepatan sasaran kepada warga desil 1 merupakan modal sosial yang sangat berharga yang harus dipertahankan.

## 2. Integritas: Pencapaian Target Fisik Dan Sosial Program Bedah Rumah

Integrasi sebagai indikator kedua dari efektivitas menurut (Richard, 2005) berfokus pada kelancaran proses dan kolaborasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam konteks Program Bedah Rumah di Desa Matolele, integrasi tidak hanya diukur dari ada tidaknya koordinasi, tetapi dari sejauh mana seluruh pemangku kepentingan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tim pelaksana, masyarakat penerima manfaat, hingga penyedia material dapat bekerja sama secara harmonis, transparan, dan akuntabel. Integrasi yang kuat menjadi prasyarat agar dana desa yang terbatas dapat digunakan secara efisien dan tepat guna. Temuan lapangan menunjukkan bahwa integrasi internal di tingkat desa berjalan sangat solid. Kepala Desa Tefan menegaskan bahwa program ini dilaksanakan berdasarkan musyawarah (*usawara*) yang melibatkan BPD dan masyarakat, bukan keputusan sepihak. Mekanisme ini menciptakan integrasi vertikal yang kuat antara pemerintah desa dan warga, serta integrasi horizontal antar warga sendiri. Keterlibatan BPD sangat aktif mulai dari penetapan anggaran, verifikasi penerima, hingga pengawasan harian. Aksam selaku ketua BPD menyatakan bahwa setiap usulan harus mendapat persetujuan bersama antara BPD dan Kepala Desa, menciptakan sistem *checks and balances* yang efektif. Selain itu, Tim Pelaksana yang diwawancarai menambahkan bahwa proses survei, pendampingan, dan monitoring dilakukan secara kolektif oleh aparat desa dan pendamping desa, memastikan tidak ada pihak yang bekerja sendiri-sendiri.

Dibalik kekuatan integrasi internal, terdapat kelemahan signifikan pada integrasi eksternal, khususnya yang berkaitan dengan rantai pasok material. Tim Pelaksana mengakui bahwa keterlambatan suplai kayu dan pasir, yang harus didatangkan dari luar desa dengan jarak tempuh jauh dan terganggu cuaca, menjadi kendala utama yang menghambat kecepatan penyelesaian rumah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat berjalan lancar, integrasi dengan pihak luar (penyedia material, sistem transportasi) masih lemah. Dengan kata lain, program ini terhambat bukan oleh masalah internal desa, tetapi oleh ketergantungan pada ekosistem logistik yang berada di luar kendali langsung pemerintah desa.

Dari perspektif teori (Richard, 2005), integrasi yang efektif mensyaratkan adanya kemampuan organisasi untuk menyelaraskan berbagai sumber daya dan aktor

ke dalam satu kerangka kerja yang terarah. Di Desa Matolele, mekanisme musyawarah dan gotong royong telah berhasil menciptakan integrasi sosial yang kokoh, di mana penerima manfaat seperti Ibu Sumiati dan Ibu Samsidri merasa dilibatkan sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penerima bantuan. Namun, teori Steers juga mengingatkan bahwa efektivitas organisasi dapat terganggu jika salah satu mata rantai dalam sistem integrasi putus. Dalam kasus ini, mata rantai yang putus adalah integrasi logistik dengan ekosistem pemasok material. Akibatnya, meskipun koordinasi internal berjalan lancar, hasil akhir berupa rumah yang selesai tepat waktu tetap tidak optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Asrifai, 2022) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Baturube, yang juga menemukan bahwa kendala utama sering kali terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menambahkan dimensi baru, yaitu bahwa selain SDM dan partisipasi, integrasi logistik dengan pihak luar desa merupakan faktor kritis yang sering terabaikan dalam studi efektivitas Dana Desa. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengungkapan bahwa keberhasilan program bedah rumah tidak hanya bergantung pada tata kelola internal desa, tetapi juga pada kemampuan desa untuk mengelola hubungan dengan pemasok material yang berada di luar wilayah administratifnya.

Dengan demikian, indikator integrasi menunjukkan bahwa Desa Matolele telah berhasil membangun koordinasi internal yang sangat baik melalui musyawarah, gotong royong, dan pengawasan bersama. Namun, kelemahan pada integrasi logistik eksternal menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Ke depan, diperlukan mekanisme pengadaan material yang lebih terjamin, misalnya melalui kontrak jangka panjang dengan pemasok atau pembentukan gudang logistik desa, agar program bedah rumah tidak lagi bergantung pada pasokan yang tidak menentu. Penguatan integrasi eksternal ini akan melengkapi kekuatan integrasi internal yang sudah solid, sehingga efektivitas program dapat meningkat secara signifikan.

### **3. Adaptasi: Penggunaan Sumber Daya Dalam Program Bedah Rumah**

Adaptasi sebagai indikator ketiga dari efektivitas menurut (Richard, 2005) menekankan pada kemampuan organisasi atau program untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, kendala di lapangan, serta kebutuhan spesifik yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam konteks Program Bedah Rumah di Desa Matolele, adaptasi menjadi kunci karena pelaksanaan pembangunan di wilayah dengan akses transportasi terbatas dan kondisi geografis berbukit selalu menghadapi ketidakpastian, mulai dari ketersediaan material, perubahan harga, hingga kondisi cuaca. Program yang adaptif adalah program yang tidak kaku terhadap rencana awal, tetapi mampu merespons realitas di lapangan tanpa mengorbankan tujuan utamanya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa program bedah rumah di Desa Matolele memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi, terutama dalam merespons aspirasi masyarakat dan kendala teknis. Kepala Desa Tefan menjelaskan bahwa meskipun terdapat rencana fisik awal, perubahan desain rumah sering kali dilakukan

berdasarkan hasil musyawarah (*usawara*) dengan penerima manfaat. Perubahan ini bukan atas keinginan pribadi, melainkan hasil kesepakatan bersama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan riil warga. Misalnya, jika ternyata rumah penerima membutuhkan perkuatan struktur yang berbeda dari rencana awal, maka musyawarah desa dapat mengubah prioritas penggunaan material. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa program tidak berjalan secara kaku dan *top-down*, melainkan responsif terhadap kondisi nyata di tingkat tapak.

Adaptasi juga terlihat dari fleksibilitas anggaran dan proses penetapan prioritas. Ketua BPD, Aksam, menyatakan bahwa meskipun standar bantuan per unit adalah Rp20 juta, musyawarah desa memungkinkan adanya penyesuaian jika terdapat usulan dari masyarakat yang dinilai kurang prioritas atau sebaliknya, ada kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi. Proses konsultasi dan musyawarah ini menjadi mekanisme adaptif yang menjamin anggaran Dana Desa dialokasikan untuk pihak yang paling membutuhkan. Dengan kata lain, program ini tidak terikat secara kaku pada daftar penerima yang sudah ditetapkan di awal, tetapi dapat berubah jika kondisi di lapangan menunjukkan adanya kerentanan yang lebih tinggi pada warga lain.

Dari perspektif teori (Richard, 2005), adaptasi merupakan salah satu dimensi kunci efektivitas organisasi karena lingkungan selalu berubah. Steers berpendapat bahwa organisasi yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan pencapaian tujuan internal dengan tuntutan eksternal. Di Desa Matolele, kemampuan adaptasi ini diwujudkan melalui dua mekanisme utama. Pertama, adaptasi terhadap aspirasi masyarakat melalui musyawarah, yang memungkinkan program menyesuaikan desain dan prioritas. Kedua, adaptasi terhadap kendala teknis dan logistik, seperti yang dilakukan Tim Pelaksana ketika menghadapi keterlambatan pasokan kayu. Tim beradaptasi dengan menyesuaikan jadwal pengerjaan, mencari sumber bahan baku alternatif yang lebih jauh, serta mengandalkan gotong royong aparat desa tanpa upah untuk menghemat biaya. Meskipun lambat, adaptasi ini memastikan rumah tetap dibangun dengan kualitas baik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Muh Nawawi, 2024) tentang Efektivitas Program Bantuan *Stimulant* Perumahan Swadaya Di Desa Rerang, yang juga menemukan bahwa koordinasi dan fleksibilitas dalam menghadapi kendala lapangan menjadi faktor penentu efektivitas. Penelitian ini menambahkan dimensi baru, yaitu bahwa di Desa Matolele, adaptasi tidak hanya bersifat teknis (mencari material alternatif), tetapi juga bersifat sosial-budaya dengan mengaktifkan kembali nilai gotong royong sebagai strategi adaptif terhadap keterbatasan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi sumber daya adaptif yang sangat berharga ketika sumber daya modern (seperti anggaran yang cukup atau rantai pasok yang lancar) tidak tersedia. Kontribusi penelitian ini adalah menunjukkan bahwa program berbasis Dana Desa di wilayah terpencil dapat tetap berjalan efektif jika mampu mengadaptasi nilai-nilai lokal ke dalam mekanisme pelaksanaannya.

Dengan demikian, indikator adaptasi menunjukkan bahwa program bedah

rumah di Desa Matolele memiliki kapasitas responsif yang tinggi. Fleksibilitas dalam desain, anggaran, prioritas penerima, serta metode kerja (gotong royong) merupakan bukti nyata bahwa program ini tidak kaku dan mampu bertahan di tengah keterbatasan. Namun, adaptasi yang bersifat reaktif ini sebaiknya dilengkapi dengan perencanaan kontingensi yang lebih matang, misalnya dengan menyediakan dana cadangan untuk fluktuasi harga material atau membangun gudang penyangga logistik. Dengan demikian, program tidak hanya adaptif dalam merespons masalah, tetapi juga antisipatif dalam mencegah masalah. Kemampuan adaptasi yang terus ditingkatkan akan membuat program bedah rumah semakin efektif dan berkelanjutan di masa depan.

### **Kesimpulan**

Efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program bedah rumah di Desa Matolele telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Dari aspek pencapaian tujuan, program ini berhasil memenuhi target fisik dengan menyelesaikan dua unit rumah dan satu unit rumah dalam proses pengerjaan, serta seleksi penerima yang tepat sasaran berdasarkan kriteria ekonomi sangat miskin (desil 1), sehingga menunjukkan efektivitas dalam hal ketepatan sasaran. Namun, dari sisi *output*, masih terdapat kendala logistik seperti keterlambatan pasokan bahan baku kayu dan pasir akibat faktor jarak dan cuaca, yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian program. Dari perspektif integrasi, mekanisme koordinasi antara pemerintah desa, BPD, tim pelaksana, dan masyarakat telah berjalan dengan baik melalui prinsip musyawarah dan gotong royong, di mana BPD berperan aktif dalam pengawasan harian dan penetapan anggaran sebesar Rp20 juta per unit, serta keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja sukarela tanpa upah. Sementara dari aspek adaptasi, program ini menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan perencanaan fisik dan penganggaran melalui forum musyawarah desa, serta kemampuan tim pelaksana dalam mencari sumber bahan baku alternatif dan menyesuaikan jadwal pengerjaan. Pada akhirnya, meskipun program telah berjalan cukup efektif dengan dukungan modal sosial yang kuat, penguatan kapasitas pengawasan partisipatif, penyusunan prosedur operasional yang baku, serta optimalisasi rantai pasok material sangat diperlukan untuk memastikan konsistensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program di masa mendatang.

### **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penelitian ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen dan pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan dukungan, serta kepada semua informan yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pendapat mereka. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan peneliti yang telah memberikan saran dan kerja sama yang berharga. Semoga hasil penelitian ini dapat

memberikan manfaat bagi Pemerintah Sulawesi tengah dan masyarakat mengenai Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Program Bedah Rumah di Desa Matolele, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam lingkup Ilmu Pemerintahan.

## Referensi

- Asrifai, La Husen Zuada. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara. Estd.Perpus.Untad.Ac.Id.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Irwan Waris. (2021). Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Poleroa-Makuhi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Estd.Perpus.Untad.Ac.Id.
- Kaawoan, J. E., & Rengkung, F. (T.T.). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015 Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur.
- Lestari, N. (2023). Manajemen Dana Desa: Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Di Tingkat Desa. Alfabeta.
- M. Nur Alamsyah, Lahusen Zuada. (2024). Koordinasi Kepala Desa Dan Bpd Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Olonggata Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Estd.Perpus.Untad.Ac.Id.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Muh Nawawi, Rusmawaty Bte. (2024). Efektivitas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya Di Desa Rerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Estd.Perpus.Untad.Ac.Id.
- Nurhannis, Mahfuzat. (2022). Pengelolaan Program Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu. Estd.Perpus.Untad.Ac.Id/.
- Richard M Steers. (2005). *Fektivitas Organisasi*, Diterjemahkan Oleh Magdalena Jamin. Jakarta. Erlangga.
- Riyadi, M. (2023). *Sistem Tata Kelola Pemerintahan Indonesia: Dari Pusat Ke Desa*. Kencana.
- Rusandi M. Muhammad Rusli. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*.
- Susanto, A., & Pratiwi, R. (2024). Peran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bpd) Dalam Pengawasan Siklus Perencanaan Pembangunan Hingga Pertanggungjawaban: Upaya Pencegahan Penyimpangan Dan Perlindungan Kepentingan Publik. *12(2)*, 145–162.
- Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220–1230. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>
- Wibowo, A. (2019). Dampak Sosial Dan Kesehatan Program Bedah Rumah Bagi Keluarga

- Mbr Di Perkotaan". *Urnal Kesejahteraan Sosial*, 130–144.
- Zaitun, B. (2022). *Manajemen Alokasi Dana Desa Di Desa Matolele Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong*. Universitas Tadulako,.
- Zuchri Abdussamad,. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.